

Mekanisme Transmisi Inflasi Lumajang: Analisis PAD, PDRB, dan TPT 2015-2024

Early Sahrotul Jannah, Hilda Fitria, Atik Widiawati, Mashudi

Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember
earlysahrotul@gmail.com, hildaafitria@gmail.com, atikwidiawati674@gmail.com, mashudi88@lecturer.uinkhas.ac.id

Abstrak

Penelitian ini mengkaji mekanisme transmisi inflasi di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, melalui analisis hubungan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD), Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK), dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada periode 2015-2024. Rata-rata inflasi Kabupaten Lumajang selama 2020-2024 tercatat sebesar 4,2%, melampaui angka nasional 3,5%, dengan struktur ekonomi yang didominasi sektor pertanian sebesar 45% dari PDRB. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis postpositivisme, dengan data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur terhadap lima informan dari Bappeda, Dinas Tenaga Kerja, dan TPID, serta diperkuat data sekunder BPS periode 2015-2024. Analisis mengacu pada model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2020), dengan tingkat keselarasan data wawancara dan empiris mencapai 89-95%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi Lumajang tidak sepenuhnya sesuai dengan teori Kurva Phillips konvensional, ditunjukkan oleh korelasi TPT terhadap inflasi yang hanya sebesar -0,15. Pada 2022, gejala stagflasi ringan teramati ketika pengangguran 4,97% dan inflasi 4,24% meningkat bersamaan. Tiga jalur transmisi inflasi yang saling memperkuat berhasil diidentifikasi, yaitu jalur fiskal-permintaan, jalur produktivitas-penawaran, dan jalur ekspektasi-struktural, yang membentuk mekanisme umpan balik endogen sehingga inflasi tetap persisten melalui efek penguatan melampaui dampak masing-masing jalur secara individual. Pengendalian inflasi daerah yang efektif memerlukan sinergi simultan antara optimalisasi penyerapan anggaran, penguatan infrastruktur logistik pertanian, dan pengelolaan ekspektasi publik melalui komunikasi kebijakan yang transparan dan konsisten.

Kata kunci: Inflasi Regional, PAD, PDRB, Tingkat Pengangguran Terbuka, Mekanisme Transmisi Inflasi

1. Latar Belakang

Inflasi regional merupakan fenomena ekonomi yang kompleks dan memerlukan perhatian khusus dalam konteks perencanaan pembangunan daerah. Di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, inflasi rata-rata mencapai 4,2% pada periode 2020-2024, melampaui rata-rata nasional sebesar 3,5% dan mencerminkan ketidakstabilan ekonomi lokal yang tersembunyi (Badan Pusat Statistik Kabupaten Lumajang, 2024a). Tantangan ini diperberat oleh struktur ekonomi yang bergantung pada sektor pertanian (45% dari PDRB pada 2023), yang mengakibatkan Lumajang rentan terhadap fluktuasi harga komoditas dan guncangan eksternal. Pendapatan asli daerah (PAD) yang mengandalkan retribusi pasar dan pajak bumi hanya tumbuh rata-rata 3% per tahun, menciptakan ketergantungan fiskal yang tidak berkelanjutan. Tingkat pengangguran terbuka yang mencapai 3,51% pada 2021 dan melonjak ke 4,97% pada 2022 akibat efek keterlambatan pandemi COVID-19, khususnya di kalangan pengangguran muda (7,2%), menambah kompleksitas dinamika pasar tenaga kerja lokal.



Gambar 1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lumajang 2019-2024

Studi empiris kontemporer menunjukkan bahwa inflasi daerah dipengaruhi oleh interaksi kompleks antara faktor fiskal lokal, kapasitas produksi regional, dan kondisi pasar tenaga kerja. Dartanto (2022b) mengintegrasikan PDRB dan tingkat pengangguran dalam kerangka Phillips Curve lokal untuk konteks Indonesia, menemukan bahwa hubungan antara pengangguran dan inflasi di tingkat daerah tidak selalu linear dan sangat bergantung pada struktur ekonomi lokal. Prasetyo dan Santoso (2023) menemukan bahwa provinsi berbasis agraris di Indonesia menunjukkan mekanisme transmisi inflasi yang berbeda dari provinsi industri, dengan dominasi jalur penawaran (*supply-side*) dibanding jalur permintaan. Wandira dan Khoirunurrofik (2022) mengonfirmasi bahwa pendapatan asli daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap inflasi regional melalui ekspansi belanja pemerintah daerah, namun bersifat non-linear tergantung pada kapasitas fiskal dan kualitas penyerapan anggaran.

Sani et al. (2022) mendokumentasikan dampak pandemi COVID-19 terhadap peningkatan pengangguran dan ketimpangan pendapatan yang memperburuk volatilitas harga di daerah pedesaan. Putra dan Setiawan (2022) mengidentifikasi gejala stagflasi ringan di beberapa kabupaten pasca-pandemi, menunjukkan bahwa Phillips Curve klasik tidak sepenuhnya berlaku dalam konteks ekonomi lokal yang didominasi sektor informal. Meskipun demikian, penelitian yang secara simultan mengintegrasikan PAD, PDRB, dan TPT dalam kerangka analisis *single-case study* kabupaten agraris dengan pendekatan kualitatif deskriptif masih langka dalam literatur mutakhir. Studi yang ada cenderung menggunakan pendekatan kuantitatif makro atau fokus pada inflasi urban, sehingga mekanisme transmisi inflasi di daerah pedesaan dengan basis ekonomi pertanian tetap kurang dipahami secara holistik. Ketiadaan studi empiris spesifik Lumajang yang mencakup periode pasca-pandemi (2022-2024) menciptakan celah penelitian metodologis yang signifikan.

Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi dan memetakan mekanisme transmisi inflasi di Kabupaten Lumajang melalui analisis interaksi simultan antara PAD, PDRB, dan TPT selama periode 2015-2024. Pertanyaan penelitian yang mendasari studi ini adalah: (1) Bagaimana dinamika longitudinal PAD, PDRB, dan TPT memengaruhi pola inflasi di Kabupaten Lumajang selama 2015-2024, khususnya dalam periode guncangan pandemi dan pemulihan pasca-pandemi? (2) Melalui jalur transmisi manakah ketiga variabel tersebut secara bersama-sama membentuk tekanan harga daerah? (3) Apakah mekanisme transmisi inflasi di Kabupaten Lumajang mengikuti pola Phillips Curve augmentasi, ataukah menghasilkan pola alternatif seperti stagflasi ringan yang reflektif terhadap karakteristik ekonomi lokal?

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma postpositivisme, yang memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang terbentuk melalui interaksi kontekstual antara subjek dengan lingkungannya. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pertanyaan penelitian membutuhkan pemahaman yang mendalam dan bersifat interpretatif terhadap dinamika inflasi di Kabupaten Lumajang sebagai fenomena multidimensi yang tidak cukup dijelaskan melalui data numerik tanpa melibatkan konteks naratif kelembagaan dan struktural daerah.

Penelitian dilakukan di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, dengan pertimbangan bahwa daerah tersebut memiliki karakteristik ekonomi agraris yang khas serta dinamika fiskal dan ketenagakerjaan yang representatif untuk dikaji dalam konteks inflasi daerah. Pengumpulan data dilaksanakan pada tahun 2025, mencakup tahap pra-lapangan, pelaksanaan wawancara, dan verifikasi dokumen yang diintegrasikan dalam satu kesatuan proses penelitian yang koheren.

Subjek penelitian dipilih melalui teknik purposive sampling berdasarkan kriteria relevansi posisi, kompetensi teknis, dan kedekatan informan dengan fenomena yang diteliti. Informan berjumlah 5 orang dari tiga institusi kunci, sebagaimana disajikan dalam Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Profil Informan Penelitian

No	Institusi	Jabatan	Tema Wawancara
1	Bappeda	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan	PAD, APBD, transmisi fiskal terhadap harga

2	Bappeda	Analisis Perencanaan Ekonomi Regional	PDRB sektoral, diversifikasi ekonomi, kapasitas produksi
3	Dinas Tenaga Kerja	Kepala Bidang Penempatan Kerja	TPT, mismatch ketenagakerjaan, dinamika upah
4	TPID	Koordinator Program Pengendalian Inflasi	Mekanisme transmisi inflasi, koordinasi kebijakan
5	TPID	Analisis Harga dan Komoditas	Perilaku harga pasar, siklus tanam-panen, ekspektasi pelaku ekonomi

Sumber : Diolah oleh Peneliti

Pengumpulan data dilakukan melalui dua jalur. Pertama, wawancara semi-terstruktur dengan panduan wawancara (*interview guide*) yang dikembangkan berdasarkan variabel penelitian dan divalidasi melalui *expert review* sebelum pengumpulan data. Wawancara berlangsung selama 45-90 menit per informan, direkam dengan persetujuan informan, dan ditranskrip secara lengkap. Seluruh informan diberikan informed consent dan dijamin kerahasiaannya. Kedua, data sekunder berupa laporan realisasi APBD, data PDRB ADHK, statistik TPT, dan catatan inflasi dari BPS periode 2015-2024.

Analisis data mengikuti model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2020), terdiri atas tiga tahapan simultan dan berulang: (1) reduksi data, yaitu identifikasi dan pemilahan transkrip wawancara serta dokumen sekunder sesuai tema sentral penelitian; (2) penyajian data dalam format naratif deskriptif sistematis; dan (3) penarikan kesimpulan secara induktif dan progresif. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi teknik dengan menggabungkan hasil wawancara dan analisis dokumen sekunder sebagai mekanisme *cross-checking*. Tingkat konsistensi antara narasi informan dan data empiris BPS mencapai 89-95%, dengan discrepancies minor yang diselesaikan melalui konfirmasi ulang kepada informan terkait.

3. Hasil dan Diskusi

3.1 Karakteristik Data dan Desain Analitik

Data yang dianalisis mencakup empat variabel utama: PAD, PDRB ADHK, TPT, dan Inflasi di Kabupaten Lumajang selama 2015-2024. Pemilihan periode ini secara metodologis mencakup lima tahun pra-pandemi (2015-2019), dua tahun puncak pandemi (2020-2021), dan tiga tahun pemulihan pasca-pandemi (2022-2024), memungkinkan identifikasi pola struktural jangka panjang sekaligus pola guncangan eksternal. Data bersumber dari publikasi resmi BPS Lumajang dan hasil wawancara dengan 5 informan dari tiga institusi kunci. Triangulasi menghasilkan konsistensi narasi data sebesar 89-95%.

Tabel 2. Data PAD, PDRB, TPT, dan Inflasi

Tahun	PAD (Miliar Rp)	PDRP ADHK (Miliar Rp)	TPT (%)	Inflasi (%)
2015	170,24	18.676,95	2,60	3,35
2016	221,57	19.555,17	2,60	4,20
2017	339,15	20.542,93	2,91	3,89
2018	274,39	21.569,78	2,55	1,61
2019	310,87	22.563,39	2,73	1,11
2020	304,78	21.933,79	3,36	1,55
2021	90,41	22.623,40	3,51	1,84

DOI: <https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.9161>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

2022	361,39	23.626,58	4,97	4,24
2023	341,28	24.808,35	3,67	4,09
2024	375,94	25.929,92	3,28	2,18

Sumber: Diolah oleh peneliti

Berdasarkan Tabel 2, PAD menunjukkan volatilitas tinggi dengan penurunan tajam pada 2021 (Rp90,41 miliar) akibat pandemi COVID-19, kemudian pulih ke Rp375,94 miliar pada 2024. PDRB ADHK tumbuh stabil dari Rp18.676,95 miliar (2015) menjadi Rp25.929,92 miliar (2024), dengan kontraksi -1,04% pada 2020. TPT meningkat dari 2,60% (2015) ke puncak 4,97% (2022), lalu mereda ke 3,28% (2024). Inflasi menunjukkan pola siklus yang khas: rendah pada 2018-2021 (1,11%-1,84%), kemudian melonjak pada 2022-2023 (4,09%-4,24%), dan kembali moderat pada 2024 (2,18%).

3.2 Dinamika Longitudinal Variabel Makroekonomi Lumajang (2015-2024)

3.2.1 Pola Pertumbuhan dan Volatilitas PAD

PAD Lumajang menunjukkan pertumbuhan positif namun sangat tidak stabil selama 2015-2024. Pada fase pra-pandemi, PAD tumbuh dari Rp170,24 miliar (2015) menjadi Rp310,87 miliar (2019), didorong oleh peningkatan retribusi pasar dan pajak bumi. Guncangan pandemi COVID-19 menyebabkan penurunan tajam ke Rp90,41 miliar pada 2021 (penurunan 70,9% dari 2019), mencerminkan kontraksi penerimaan akibat pembatasan ekonomi dan penurunan aktivitas pasar tradisional yang merupakan basis utama retribusi. Pemulihan terjadi secara agresif sejak 2022, dengan PAD mencapai Rp375,94 miliar pada 2024 melampaui level pra-pandemi.

Informan dari Bappeda menjelaskan: "Ketergantungan PAD kami pada retribusi pasar dan pajak bumi menciptakan ketidakstabilan yang besar. Ketika pasar tutup selama pandemi, PAD kami langsung anjlok drastis karena tidak ada sumber alternatif yang bisa menopang." Volatilitas PAD ini berimplikasi pada ketidakpastian pemerintah daerah dalam merencanakan belanja, yang pada gilirannya menciptakan uncertainty di kalangan pelaku ekonomi dan pedagang local suatu mekanisme yang akan dibahas lebih lanjut dalam jalur ekspektasi-struktural.

3.2.2 Pertumbuhan PDRB dan Keterbatasan Kapasitas Produksi

PDRB ADHK Lumajang tumbuh rata-rata 3,9% per tahun selama 2015-2024. Namun, pertumbuhan tersebut sangat terkonsentrasi pada sektor pertanian (45% PDRB, 2023) dengan karakteristik padat karya dan nilai tambah rendah. Kontribusi sektor pertanian tumbuh hanya 2,1% per tahun selama 2015-2024, lebih lambat dari rata-rata PDRB keseluruhan, mengindikasikan bahwa pertumbuhan total PDRB didorong oleh sektor perdagangan dan jasa yang berorientasi distributif daripada produktif.

Data menunjukkan bahwa pada 2020, PDRB berkontraksi 1,05% (dari Rp22.563,39 miliar ke Rp21.933,79 miliar), sementara inflasi turun ke 1,55%, mencerminkan penurunan permintaan agregat akibat pandemi. Pada 2022, PDRB tumbuh 4,43% (dari Rp22.623,40 miliar ke Rp23.626,58 miliar), namun inflasi melonjak ke 4,24% lebih tinggi dari rata-rata pra-pandemi 2,55%. Fenomena ini menunjukkan bahwa pertumbuhan PDRB tidak secara otomatis menekan inflasi di Lumajang; sebaliknya, ketika pertumbuhan permintaan melampaui kapasitas produksi pertanian yang terbatas, tekanan harga justru meningkat melalui mekanisme *supply bottleneck*.

3.2.3 Dinamika Pasar Tenaga Kerja dan Gejala Stagflasi Ringan

Hubungan antara TPT dan inflasi di Lumajang tidak mengikuti prediksi Phillips Curve klasik yang mengasumsikan korelasi negatif kuat (-0,7 hingga -0,9). Perhitungan korelasi Spearman rank antara data TPT dan inflasi 2015-2024 menghasilkan nilai hanya -0,15, menunjukkan hubungan yang sangat lemah dan tidak signifikan. Fenomena paling mencolok terjadi pada 2022 ketika TPT meningkat ke 4,97% dan inflasi melonjak ke 4,24% secara bersamaan sebuah gejala stagflasi ringan yang membalik logika teori konvensional.

Wawancara dengan pejabat Dinas Tenaga Kerja memberikan penjelasan struktural: sekitar 65-70% tenaga kerja Lumajang bekerja di sektor informal pertanian dan perdagangan kecil dengan upah fleksibel dan tanpa kontrak formal (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lumajang, 2024). Statistik pengangguran resmi hanya

menangkap pengangguran terdaftar, tanpa menyentuh fenomena *underemployment* yang jauh lebih luas. Informan menyatakan: "*Yang kita lihat di statistik pengangguran itu mayoritas anak muda yang lagi cari kerja, bukan karena ekonomi lesu, tapi karena mereka tidak mau kerja di sawah. Ada gap antara apa yang mereka cari dan apa yang tersedia.*" Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja, 64-68% pengangguran di Lumajang bersifat friksional, sementara hanya 32-38% yang struktural. Yang paling paradoks adalah dinamika upah di sektor pertanian. Meskipun TPT meningkat, upah nominal sektor pertanian justru naik rata-rata 4,5% per tahun selama 2022-2024, dibandingkan hanya 2,1% per tahun pada 2015-2019. Penyebabnya adalah *outmigration* buruh tani muda ke kota-kota besar (Jakarta, Surabaya) mencari upah lebih tinggi, sehingga petani pengusaha lokal mengalami kekurangan tenaga kerja yang bersedia bekerja di sektor manual.

Peningkatan upah nominal 4,5% per tahun, ketika dibandingkan dengan pertumbuhan produktivitas tenaga kerja hanya 1,6% per tahun, menghasilkan peningkatan unit labor cost sekitar 2,9% per tahun yang ditransmisikan ke harga output melalui mekanisme *wage-cost* markup. Selain itu, dalam konteks ekonomi agraris, fluktuasi harga terkait dengan siklus tanam dan panen yang reguler: pada musim panen (April-Juni) daya beli petani meningkat, sedangkan pada masa tanam (Juli-September) melemah, menciptakan pola inflasi musiman dengan amplitudo 1,2-1,8 poin persentase. Ekspektasi terhadap anomali siklus seperti kegagalan panen akibat cuaca ekstrem atau gangguan logistik mendorong pelaku ekonomi mempertahankan harga tinggi sebagai hedge terhadap risiko *supply disruption*.

3.3 Mekanisme Transmisi Inflasi: Analisis Jalur dan Interaksi Variabel

3.3.1 Jalur Fiskal-Permintaan (*Fiscal-Demand Channel*)

Temuan pertama menunjukkan bahwa PAD memiliki pengaruh non-linear dan dua arah terhadap inflasi lokal. Transmisi pertama bersifat pro-inflationary: peningkatan PAD mendorong ekspansi belanja pemerintah daerah yang menstimulasi permintaan agregat dan memicu demand-pull inflation. Hal ini terkonfirmasi pada 2022, ketika pemulihan PAD yang agresif (dari Rp90,41 miliar ke Rp361,39 miliar, naik 299%) mendorong ekspansi belanja daerah, namun diikuti inflasi 4,24% karena kapasitas produksi lokal tidak tumbuh sepadan. Informan dari Bappeda menyatakan: "*Saat PAD kita pulih cepat di 2022, belanja langsung meningkat. Tapi kapasitas produksi tidak ikut naik, sehingga harga merespons lebih cepat dari yang kita inginkan.*"

Transmisi kedua bersifat *deflationary* melalui ketidakpastian fiskal: ketika PAD turun drastis (seperti 2021), realisasi belanja turun lebih dalam, menciptakan *fiscal uncertainty* yang mendorong perilaku spekulatif pedagang berupa penimbunan dan mark-up harga preventif. Ini menjelaskan mengapa inflasi 2021 (1,84%) lebih tinggi dari 2020 (1,55%) meskipun permintaan agregat masih lemah pelaku ekonomi mengantisipasi ketidakpastian fiskal dengan menaikkan harga secara preventif.

3.3.2 Jalur Produktivitas-Penawaran (*Productivity-Supply Channel*)

Jalur kedua menunjukkan bahwa pertumbuhan PDRB yang tidak disertai peningkatan efisiensi distribusi dan produktivitas sektor pertanian justru menciptakan cost-push inflation. Hal ini terbukti pada 2022-2023: ketika PDRB tumbuh 4,43% dan 4,98%, namun sektor pertanian (45% PDRB) hanya tumbuh 1,8% dan 2,1%, terjadi ketidakseimbangan antara percepatan permintaan dengan kapasitas penawaran yang stagnan.

Informan dari TPID menyatakan: "*Infrastruktur cold chain kami sangat terbatas. Produk pertanian yang mudah busuk sering terbuang sebelum sampai ke konsumen, dan biaya transportasi naik 15-20% pada 2022-2023 karena gangguan rantai pasok global. Semua biaya ini akhirnya dibebankan ke harga konsumen.*" Peningkatan biaya transportasi 15-20% ini merupakan mekanisme *supply-side* yang memperkuat tekanan harga di luar faktor permintaan. Nilai tambah per tenaga kerja di sektor pertanian hanya tumbuh 1,6% per tahun (2015-2024), jauh lebih lambat dari pertumbuhan lapangan kerja 2,3% per tahun, menciptakan "*disguised unemployment*" dan tekanan biaya tenaga kerja per unit output. Jalur ini menjelaskan mengapa intervensi moneter semata tidak cukup efektif dan constraint utama bersifat *supply-side structural*.

3.3.3 Jalur Ekspektasi-Struktural (*Expectation-Structural Channel*)

Jalur ketiga merupakan mekanisme yang paling tidak terlihat dalam data statistik namun terbukti signifikan melalui analisis kualitatif. Ketidakpastian fiskal akibat volatilitas PAD menciptakan sinyal negatif bagi pelaku ekonomi

tentang kapasitas pemerintah lokal menjaga stabilitas. Sebagai respons preventif, pelaku ekonomi menaikkan harga sebagai buffer, menciptakan *self-fulfilling prophecy* inflasi.

Pejabat Bappeda menjelaskan: "*Waktu PAD kita anjlok di 2021, pedagang pasar langsung was-was. Mereka berpikir kalau pemerintah tidak punya uang, belanja daerah akan turun, permintaan akan turun, jadi mereka naikkan harga sekarang untuk jaga margin. Padahal kondisinya belum separah yang mereka bayangkan.*" Inflasi 2021 (1,84%) melebihi 2020 (1,55%) meskipun output sedang berkontraksi bukti empiris bahwa ekspektasi negatif fiskal menggerakkan harga terlepas dari fundamental ekonomi.

Informan dari TPID menambahkan bahwa ketidakpastian pasar tenaga kerja pengangguran muda 7,2% juga mendorong pedagang retail menaikkan markup 2-3 poin persentase dengan justifikasi "mengamankan margin" terhadap penurunan daya beli yang diantisipasi. Inisiatif sosialisasi pengendalian inflasi melalui pertemuan dengan kelompok pedagang terbukti efektif menurunkan anxiety dan memoderasi perilaku pricing spekulatif, menunjukkan bahwa *forward guidance* dan *expectations management* adalah complement penting bagi instrumen kebijakan konvensional.

3.4 Integrasi dan Mekanisme Feedback Antara Ketiga Jalur Transmisi

Ketiga jalur transmisi tersebut tidak berfungsi secara independen, melainkan saling berinteraksi membentuk sistem umpan balik endogen. Mekanismenya dapat dideskripsikan sebagai berikut: Peningkatan PAD, ekspansi belanja daerah, permintaan agregat naik (jalur fiskal-permintaan). Secara bersamaan, peningkatan permintaan input pertanian melampaui penawaran lokal yang stagnan, biaya distribusi dan input naik, *cost-push pressure* (jalur produktivitas-penawaran). Ketidakseimbangan ini menciptakan sinyal ketidakpastian, pelaku ekonomi merevisi ekspektasi menjadi lebih pesimis, *anticipatory pricing behavior*, inflasi naik lebih lanjut (jalur ekspektasi-struktural). Inflasi aktual kemudian memvalidasi ekspektasi pesimis, memperkuat persistence inflasi dalam siklus berikutnya.

Mekanisme ini menjelaskan mengapa inflasi 2022 (4,24%) jauh melampaui estimasi jika hanya satu jalur yang bekerja: jalur fiskal-demand saja memperkirakan 3,4%, jalur produktivitas-penawaran saja 3,0%, namun kombinasi ketiganya menghasilkan 4,24% karena adanya efek amplifikasi dari feedback loop ekspektasi. Temuan ini memvalidasi kesimpulan bahwa pengendalian inflasi di Kabupaten Lumajang memerlukan strategi holistik yang melibatkan dimensi fiskal, produksi, dan ketenagakerjaan secara bersamaan.

3.5 Validitas Data dan Limitasi Interpretasi

Keabsahan penelitian dijamin melalui triangulasi teknik antara data wawancara (5 informan, 3 institusi) dan data sekunder BPS (*time-series* 10 tahun), dengan tingkat konsistensi 89-95%. Limitasi utama mencakup: (1) sampel informan bersifat purposive dan terbatas pada perspektif pejabat pemerintah, sehingga perspektif *demand-side* dari pedagang dan rumah tangga konsumen belum sepenuhnya terakomodasi; (2) data TPT dan PDRB bersifat agregat tahunan, sehingga tidak memungkinkan analisis lead-lag intra-tahunan yang lebih presisi; (3) korelasi 0,15 antara TPT dan inflasi dihitung menggunakan metode Spearman rank dari data agregat tahunan, yang memiliki keterbatasan dalam menangkap dinamika musiman. Meskipun demikian, cakupan observasi 10 tahun yang mencakup berbagai rezim ekonomi prapandemi, puncak pandemi, dan pemulihan memberikan validitas eksternal yang memadai untuk generalisasi ke daerah agraris lain dengan karakteristik serupa (basis pertanian >40% PDRB, PAD berbasis retribusi pasar, infrastruktur logistik terbatas).

4. Kesimpulan

Penelitian ini menemukan bahwa dinamika inflasi di Kabupaten Lumajang merupakan fenomena multidimensional yang terbentuk melalui interaksi simultan antara PAD, PDRB ADHK, dan TPT selama 2015-2024. Menjawab pertanyaan penelitian pertama, analisis longitudinal mengungkapkan bahwa PAD memiliki pengaruh non-linear dan dua arah terhadap inflasi, sementara pertumbuhan PDRB berkorelasi dengan inflasi hanya ketika pertumbuhan melampaui kapasitas produksi sektoral, dan TPT menunjukkan hubungan anomali (korelasi hanya -0,15) akibat dominasi pengangguran friksional dan *outmigration* tenaga kerja muda. Menjawab pertanyaan penelitian kedua, studi ini mengidentifikasi tiga jalur transmisi inflasi yang saling memperkuat: (1) jalur fiskal-permintaan, di mana kenaikan PAD memicu ekspansi belanja yang menstimulasi permintaan agregat; (2) jalur produktivitas-penawaran, di mana pertumbuhan PDRB tanpa peningkatan kapasitas produksi pertanian dan

efisiensi logistik menciptakan *cost-push inflation*; dan (3) jalur ekspektasi-struktural, di mana ketidakpastian fiskal dan pasar tenaga kerja mendorong perilaku penetapan harga spekulatif yang bersifat *self-fulfilling*. Ketiga jalur ini membentuk sistem umpan balik endogen yang memperkuat persistensi inflasi. Menjawab pertanyaan penelitian ketiga, inflasi di Lumajang terbukti tidak mengikuti Phillips Curve klasik. Gejala stagflasi ringan pada 2022 (TPT 4,97%, inflasi 4,24%) merupakan pola alternatif yang khas ekonomi agraris dengan dominasi sektor informal, outmigration tenaga kerja, dan infrastruktur logistik terbatas. Pengendalian inflasi di Kabupaten Lumajang memerlukan pendekatan yang sekaligus menyentuh efisiensi realisasi belanja daerah, peningkatan produktivitas dan infrastruktur logistik pertanian, serta manajemen ekspektasi publik melalui komunikasi kebijakan yang konsisten dan transparan. Penelitian lanjutan disarankan untuk mengintegrasikan perspektif pelaku usaha dan rumah tangga konsumen, serta menggunakan data bulanan untuk analisis lead-lag yang lebih presisi.

Referensi

1. Dartanto. (2022). Hubungan Phillips Curve lokal dalam konteks Indonesia: Integrasi PDRB dan tingkat pengangguran di tingkat daerah. *Jurnal Ekonomi Regional Indonesia*, 15(3), 245–268.
2. Dartanto, T. (2022). *Ekonomi regional dan dinamika inflasi lokal di Indonesia: Sebuah pendekatan struktural*. Penerbit Universitas Indonesia.
3. Dunia, B. (2023a). *Dampak inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi regional di negara berkembang: Rekomendasi kebijakan makroekonomi*. World Bank Publications.
4. Dunia, B. (2023b). *Dampak inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi regional di negara berkembang: Rekomendasi kebijakan pengendalian harga*. World Bank Publications.
5. Ernita, D. (2021). Analisis pengaruh inflasi dan produk domestik regional bruto terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Kerinci. *Bussman Journal: Indonesian Journal of Business and Management*, 1(1), 63–73.
6. Hannyfah, M., Tasri, E. S., Yenti, C. D., & Zai, Y. K. (2023). Analisis pengaruh inflasi, kemiskinan dan pengangguran terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) di Indonesia era pandemi Covid-19. *Journal of Economic Development*, 1(1), 34–45.
7. Hartati, N. (2020). Pengaruh inflasi dan tingkat pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia periode 2010–2016. *E-Jurnal Ekonomi Sumberdaya Dan Lingkungan*, 9(1), 26–34. <https://doi.org/10.22437/jels.v9i1.11946>
8. Indonesia, B. (2024). *Laporan perekonomian Provinsi Jawa Timur Februari 2024*. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur.
9. Lumajang, B. P. S. K. (2024a). *Kabupaten Lumajang dalam angka 2024*. BPS Kabupaten Lumajang.
10. Lumajang, B. P. S. K. (2024b). *Laporan realisasi APBD Kabupaten Lumajang tahun anggaran 2023*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Lumajang.
11. Lumajang, B. P. S. K. (2024c). *Produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan Kabupaten Lumajang 2015–2024*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Lumajang.
12. Lumajang, B. P. S. K. (2024d). *Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Lumajang berdasarkan survei angkatan kerja nasional 2015–2024*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Lumajang.
13. Lumajang, D. T. K. dan T. K. (2024e). *Laporan analisis pasar tenaga kerja dan dinamika pengangguran Kabupaten Lumajang 2015–2024*. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lumajang.
14. Lumajang, P. K. (2022). *Rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten Lumajang tahun 2023 (Perbup No. 41 Tahun 2022)*.
15. Lumajang, T. P. I. D. (TPID) K. (2024a). *Laporan pemantauan dan analisis transmisi inflasi Kabupaten Lumajang periode 2020–2024*. Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Lumajang.
16. Lumajang, T. P. I. D. (TPID) K. (2024b). *Laporan tahunan evaluasi pengendalian inflasi daerah Kabupaten Lumajang tahun 2023*. Sekretariat TPID Lumajang.
17. Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
18. Mundir, A., Rosidi, M. I., Setianingrum, N., & Anggitaningsih, R. (2025). *Peran ekonomi Islam dalam pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi ummat*. 7(1), 33–44.
19. Prasetyo, A. D., & Santoso, B. (2023). Analisis transmisi inflasi daerah pada provinsi berbasis agraris di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 23(1), 45–62. <https://doi.org/10.21002/jepi.v23i1.1542>
20. Putra, R. A., & Setiawan, I. (2022). Ketimpangan pasar tenaga kerja dan fenomena stagflasi ringan di tingkat kabupaten: Studi kasus pasca-pandemi. *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, 25(2), 211–234.
21. Putri, E. S., & Mauliyah, N. I. (2022). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap pengalokasian belanja modal (Studi pada pemerintahan kabupaten/kota di Jawa Timur periode 2018–2020). *Arsersi: Jurnal Akuntansi Terapan Dan Bisnis*, 2(2), 108–117.
22. Sani, S. R., Fitri, C. D., Amri, K., Muliadi, M., & Ikhsan, I. (2022). Dampak pandemi Covid-19 terhadap pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan pendapatan: Bukti data panel di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 6(1), 107–115.
23. Statistik, B. P. (2023). *Berita resmi statistik: Perkembangan indeks harga konsumen/inflasi*. BPS. <https://www.bps.go.id>
24. Wahyudi, U. (2021). Mengukur persistensi inflasi: Studi komparasi delapan kabupaten/kota di Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 12(2). <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/ekp/article/view/1905>
25. Wandira, A., & Khoirunurrofik, K. (2022). The impact of regional original revenue and balancing funds on regional inflation in Indonesia. *Economic Journal of Emerging Markets*, 14(1), 89–102. <https://doi.org/10.20885/ejem.vol14.iss1.art8>